



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2024.

Sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 sebagai pertanggungjawaban atas capaian kinerja pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ini merupakan wujud dari Pertanggungjawaban Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemerintah dan Pembangunan daerah pada setiap tahun anggaran berakhir berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, diharapkan menjadi tolok ukur kinerja dari setiap kegiatan yang dikerjakan terkait dengan penggunaan dana, sebagaimana yang disepakati pada tahun awal anggaran. Kemudian pengukuran kinerja tersebut dilihat menurut indikator kinerja kegiatan dan sasaran sebagaimana pada Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang. Dari Pengukuran Kinerja dapat dievaluasi keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan dan kebijakan yang dilakukan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.



Harapan kami semoga LKjIP ini bermanfaat dan dipedomani bagi aparaturnya di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam mengevaluasi kinerja kegiatan, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pangkajene Sidenreng, Januari 2025
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



H. ABBAS ARAS, SP., M.AP

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19651231 198711 1 013



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Gambaran Umum Organisasi
- 1.2 Isu-isu / Permasalahan Strategis Organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umu Organisasi

Tugas dan fungsi Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 64 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa, dan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya antara lain :

1. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Masyarakat desa, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat desa, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Masyarakat desa, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan Masyarakat desa, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Bina Pemerintahan Desa;
- d. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
- e. Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa;
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;



g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Subbagian, 4 (empat) Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Sumberdaya Manusia yang tersedia pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2024 sejumlah 24 orang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dijabarkan pada table berikut :

Tabel 1.1
Klasifikasi ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sidenreng Rappang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Pendidikan | Jumlah |
|---------------|------------|-----------|
| 1 | S2 | 9 |
| 2 | S1 | 14 |
| 3 | SLTA | 1 |
| Jumlah | | 24 |

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegarwaan DPMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025

Selanjutnya klasifikasi ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 berdasarkan golongan, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Klasifikasi ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sidenreng Rappang
Berdasarkan Golongan Tahun 2024

| No | Golongan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Golongan IV | 1 | 4 | 5 |
| 2. | Golongan III | 4 | 14 | 18 |
| 3. | Golongan II | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah | | 6 | 18 | 24 |

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegarwaan DPMDPPA Kab.Sidenreng Rappang



1.2 Isu-issu/Permasalahan Strategis Organisasi

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, permasalahan yang dihadapi dapat ditinjau dari dua urusan, yaitu urusan pemberdayaan Masyarakat desa, dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pemberdayaan Masyarakat desa adalah sebagai berikut :

1. Terlambatnya penyusunan produk hukum;
2. Terlambatnya penetapan APBDes dan RKPDes di desa;
3. Terlambatnya penyusunan data profil desa;
4. Fasilitasi kerja sama antar desa, Pembangunan Kawasan dan administrasi pemerintahan desa belum berjalan maksimal;
5. Masih perlunya peningkatan pemberdayaan LKD/K dan LAD/K di Desa/Kelurahan.

Sedangkan permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah :

1. Masih terdapat OPD yang belum mampu membuat PPRG;
2. Jumlah Perempuan yang duduk di kursi parlemen masih rendah;
3. Masih rendahnya jumlah laporan kekerasan pada Perempuan;
4. Belum terlaksananya laporan gender dan anak secara rutin dari semua OPD terkait;
5. Belum maksimalnya pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA) pada semua OPD.

Adapun isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas dan fungsi, diuraikan sebagai berikut :

1. Mendukung pemerintahan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam usaha pengentasan kemiskinan ekstrim melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan Pembangunan di desa;
3. Meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Sidenreng Rappang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai wujud implementasi kinerja, perlu disusun perjanjian kinerja yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indisediator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen pimpinan unit kerja sebagai penerima amanah dan kesepakatan antara pemberi Amanah dan penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati merupakan hasil (output) atas kegiatan dan wujud kinerja (outcome) dari program pada tahun berjalan serta dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya secara berkesinambungan, dengan orientasi terhadap target capaian kinerja di periode akhir Renstra.

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 diprioritaskan pada sasaran dan target sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2024

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Desa | Indeks Ketahanan Sosial (IKS) | 0,8714 |
| | | Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) | 0,7616 |
| | | Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) | 0,7221 |
| 2 | Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan | Nilai SAKIP | 45 (C) |
| 3 | Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak | Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan | 100 |



| | | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------|-----|
| | | Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan | 100 |
|--|--|-----------------------------------------------------------|-----|

Sumber : Perjanjian Kinerja DPMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) dimaksudkan sebagai alat ukur yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu tujuan dan sasaran atau sasaran dari kegiatan utama. Dengan tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU), diharapkan mendapatkann informasi kinerja yang diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2024

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Formulasi Perhitungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--|--|-------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----|-----|-----|----|--------------------|---|---|----|----|-------------------|---|-----|-----|----|-----------------------------------------|---|-----|------|----|-----------------------------|----|----|----|-----|
| 1. | Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Desa | Indeks Ketahanan Sosial (IKS) | $\frac{\text{Jumlah IKS Desa se Kabupaten}}{\text{Jumlah Desa se Kabupaten}}$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) | $\frac{\text{Jumlah IKE Desa se Kabupaten}}{\text{Jumlah Desa se Kabupaten}}$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) | $\frac{\text{Jumlah IKL Desa se Kabupaten}}{\text{Jumlah Desa se Kabupaten}}$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan | Nilai SAKIP | Sesuai Permenpan RB No. 88 Tahun 2021, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari bebrapa komponen sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="884 1585 1323 1805"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Komponen</th> <th colspan="3">Sub-Komponen</th> <th rowspan="2">Total Bobot</th> </tr> <tr> <th>Sub-Komponen 1 Keberadaan</th> <th>Sub-Komponen 2 Kualitas</th> <th>Sub-Komponen 3 Pemanfaatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>20%</td> <td>30%</td> <td>50%</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>3</td> <td>4,5</td> <td>7,5</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td> <td>5</td> <td>7,5</td> <td>12,5</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Nilai Akuntabilitas Kinerja</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>50</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> | Komponen | Sub-Komponen | | | Total Bobot | Sub-Komponen 1 Keberadaan | Sub-Komponen 2 Kualitas | Sub-Komponen 3 Pemanfaatan | Perencanaan Kinerja | 20% | 30% | 50% | 30 | Pengukuran Kinerja | 6 | 9 | 15 | 30 | Pelaporan Kinerja | 3 | 4,5 | 7,5 | 15 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 5 | 7,5 | 12,5 | 25 | Nilai Akuntabilitas Kinerja | 30 | 30 | 50 | 100 |
| Komponen | Sub-Komponen | | | | Total Bobot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sub-Komponen 1 Keberadaan | Sub-Komponen 2 Kualitas | Sub-Komponen 3 Pemanfaatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perencanaan Kinerja | 20% | 30% | 50% | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengukuran Kinerja | 6 | 9 | 15 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pelaporan Kinerja | 3 | 4,5 | 7,5 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 5 | 7,5 | 12,5 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja | 30 | 30 | 50 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak | Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan | $\frac{\text{Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan}}{\text{Jumlah Total Perempuan Korban Kekerasan}}$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan | $\frac{\text{Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan}}{\text{Jumlah Total Anak Korban Kekerasan}}$ |
|--|--|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sumber :IKU DPMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib Menyusun Laporan Kinerja yang mana didalamnya menjelaskan tentang laporan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. | 91 % ≤ | Sangat Tinggi |
| 2. | 76 % s.d 90 % | Tinggi |
| 3. | 66 % s.d 75 % | Sedang |
| 4. | 51 % s.d 65 % | Rendah |
| 5. | 50 % | Sangat Rendah |

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dengan membandingkan target kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun 2024, dengan



realisasi kinerja tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir, dengan target kinerja jangka menengah (Renstra).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2024 melaksanakan 3 (tiga) sasaran strategis. Capaian Kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sidenreng Rappang'
Tahun 2024

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| 1. | Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Desa | Indeks Ketahanan Sosial (IKS) | 0,8714 Indeks | 0.8715 | 100.01 |
| | | Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) | 0,7616 Indeks | 0.7850 | 103.07 |
| | | Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) | 0,7221 Indeks | 0.7353 | 101.82 |
| 2. | Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan | Nilai SAKIP | 45 (C) | | |
| 3. | Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak | Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan (%) | 100% | 100% | 100 |
| | | Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan (%) | 100% | 100% | 100 |

Sumber : Data diolah Subbagian Perencanaan DPMDPPA Tahun 2024

Capaian kinerja pada tabel diatas merupakan capaian Indikator Kinerja Utama, Adapun capaian kinerja pada setiap level/tingkatan jabatan (eselon III dan IV), fungsional dan capaian kinerja individu tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :



1. Capaian Kinerja Eselon III

a. Sekretaris Dinas

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sekretaris
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2024

| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| 1. | Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan | Cakupan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100% | 100% | 100 |
| | 1.1 Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%) | 100% | 100% | 100 |
| | 1.2 Terselenggaranya Pelayanan Administrasi, Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%) | 100% | 100% | 100 |
| | 1.3 Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) | 100% | 100% | 100 |
| | 1.4 Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100% | 100% | 100 |
| | 1.5 Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan (%) | 100% | 100% | 100 |

Sumber : Laporan Pengukuran Kinerja Tahun 2024



b. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2024

| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| 1. | Meningkatnya Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Mampu Menyelenggarakan Tertib Administrasi Desa dan Pelaporan Tepat Waktu (%) | 100% | 100% | 100 |
| | 1.1 Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Cakupan Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa (%) | 100% | 100% | 100 |

Sumber : Laporan Pengukuran Kinerja Tahun 2024

c. Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2024

| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| 1. | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Mampu Meningkatkan Kapasitas Dalam Pemberdayaan Masyarakat | 100% | 100% | 100 |
| | 1.1 Terlaksananya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang dibina | 100% | 100% | 100 |

Sumber : Laporan Pengukuran Kinerja Tahun 2024



d. Kepala Bidang Pembangunan SDA dan Usaha Ekonomi Desa

Tabel 3.6

Capaian Kinerja Kepala Bidang Pemb. SDA dan Usaha Ekonomi Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2024

| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| 1. | Meningkatnya Kawasan Perdesaan yang difasilitasi | Persentase Peningkatan Kawasan Perdesaan yang difasilitasi | 100% | 100% | 100% |
| | 1.1 Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama antar Desa | Cakupan Kawasan Perdesaan | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Mampu Menyelenggarakan Tertib Administrasi Desa dan Pelaporan Tepat Waktu (%) | 100% | 100% | 100 |
| | 1.1 Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Mampu Meningkatkan Kapasitas Dalam Pemberdayaan Masyarakat | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Mampu Meningkatkan Kapasitas Dalam Pemberdayaan Masyarakat | 100% | 100% | 100 |
| | 1.1 Terlaksananya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang dibina | 100% | 100% | 100% |

Sumber : Laporan Pengukuran Kinerja Tahun 2024



2. Capaian Kinerja Eselon IV

a. Kepala Subbagian Perencanaan

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Kepala Subbagian Perencanaan Sekretariat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2024

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| 1 | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3Dokumen | 3 Dokumen | 100 |
| 2 | Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |
| 3 | Tersusunnya Dokumen Perubahan SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |
| 4 | Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |
| 5 | Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |



| | | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----|
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | |
| 6 | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | 2 Lapopran | 100 |

Sumber : Laporan Pengukuran Kinerja Tahun 2024

b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2024

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------|
| 1 | Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 145 Laporan | | |
| 2 | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 12 Laopran | 12 Laporan | 100 |
| 3 | Tersedianya Pelayanan Jasa Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 12 Laopran | 12 Laporan | 100 |
| 4 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau | 16 Unit | | |



| | | | | | |
|---|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--|--|
| | dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |
| 5 | Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 3 Unit | | |

Sumber : Laporan Pengukuran Kinerja Tahun 2024

c. Kepala Subbagian Keuangan Sekretariat

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Kepala Subbagian Keuangan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 1 | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 35 Orang/Bulan | 35 Orang/Bulan | 100 |
| 2 | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulann/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 60 Laporan | 60 Laporan | 100 |

Sumber : Laporan Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Selanjutnya untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 sebagaimana yang disajikan pada Tabel 3.2 diatas, dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja pada sasaran strategis 1 diuraikan pada tabel :



Tabel 3.8
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1

| No | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi | Capaian (%) |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| 1 | Indeks Ketahanan Sosial (IKS) | 0,8714 | 0.8715 | 100.01 |
| | Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) | 0,7616 | 0.7850 | 103.07 |
| | Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) | 0,7221 | 0.7353 | 101.82 |
| Rata-rata Capaian | | | | 101.56 |

Sumber : Data Diolah Subbagian Perencanaan DPMDPPA 2025

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian Sasaran Strategis 1 dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS) sebesar 100.01%, indikator Indeks Ketahanan Ekonomi sebesar 103.07% dan indikator Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) sebesar 101.82%, sehingga rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis ini yaitu sebesar 101.56% atau ytercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Sedangkan perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja pada sasaran strategis 2 diuraikan pada tabel :

Tabel 3.9
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran Strategis 2

| No | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi | Capaian (%) |
|----|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| 1 | Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan (%) | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan (%) | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Data Diolah Subbagian Perencanaan DPMDPPA 2025

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian Sasaran Strategis 2 dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Persentase Perempuan Korban kekerasan yang Mendapatkan Layanan sebesar 100.00%, dan indikator Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan juga mencapai target sebesar 100.00%, sehingga rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis ini yaitu sebesar 101.56% atau ytercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.



b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya 3 (tiga) tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1
3 (tiga) Tahun Terakhir

| No | Indikator Kinerja | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| 1 | Indeks Ketahanan Sosial (IKS) | 0.8689 | 0.8715 | 0.8715 |
| 2 | Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) | 0.7591 | 0.7850 | 0.7850 |
| 3 | Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) | 0.7196 | 0.7353 | 0.7353 |

Sumber : Data Diolah Subbagian Perencanaan DPMDPPA 2025

Berdasarkan Tabel di atas, realisasi kinerja masing-masing indikator kinerja untuk sasaran strategis 1 dari tahun 2022-2024 mengalami peningkatan sehingga target capaian dari 3 tahun terakhir telah mencapai target.

Untuk perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya pada sasaran strategis ke 2 dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2
3 (tiga) Tahun Terakhir

| No | Indikator Kinerja | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1 | Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan (%) | - | - | 100 |
| 2 | Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan (%) | - | - | 100 |

Sumber : Data Diolah Subbagian Perencanaan DPMDPPA 2025

Jika dilihat dari tabel di atas realisasi kinerja pada kedua indikator tersebut pada tahun 2024 telah mencapai target, namun di



tahun 2022 dan 2023 indikator tersebut belum ada akan tetapi dalam pelaksanaannya telah mencapai target yang diharapkan yakni semua korban kekerasan perempuan dan anak telah mendapatkan layanan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Adapun perbandingan untuk indikator kinerja sasaran strategis 1 Tahun 2024 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3.11

Perbandingan realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024
Dengan Target Jangka Menengah Renstra

| No | Indikator Kinerja | Realisasi Target | |
|----|-----------------------------------|------------------|------------------------|
| | | 2024 | Target Jangka Menengah |
| 1 | Indeks Ketahanan Sosial (IKS) | 0.8715 | 0.8764 |
| 2 | Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) | 0.7850 | 0.7666 |
| 3 | Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) | 0.7353 | 0.7271 |

Sumber : Data Diolah Subbagian Perencanaan DPMDPPA 2025

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan realisasi kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran strategis dengan target jangka menengah diuraikan sebagai berikut :

- Realisasi capaian indikator kinerja Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Tahun 2024 yaitu 0.8715 (indeks), jika dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu 0.8764 (indeks) ini belum mencapai target yang telah ditetapkan;
- Realisasi capaian indikator kinerja Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Tahun 2024 yaitu 0.7850 (indeks), jika dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu 0.7666 telah melampaui target yang telah ditetapkan;
- Realisasi capaian indikator kinerja Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) Tahun 2024 yaitu 0.7353 (indeks), jika dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu 0.7271 telah melampaui target yang telah ditetapkan;



Sedangkan perbandingan untuk indikator kinerja sasaran strategis 2 Tahun 2024 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3.12
Perbandingan realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2024
Dengan Target Jangka Menengah Renstra

| No | Indikator Kinerja | Realisasi Target | |
|----|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| | | 2024 | Target Jangka Menengah |
| 1 | Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan (%) | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan (%) | 100 | 100 |

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan realisasi kinerja pada kedua indikator kinerja sasaran strategis tersebut dengan target jangka menengah telah mencapai target yang telah ditetapkan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah ditetapkan.

Keberhasilan /peningkatan pencapaian pada sasaran keselarasan program antara dokumen perencanaan ini didukung dengan pro aktifnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan di tingkat desa.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2024 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan** sebesar Rp. 3.078.491.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.990.203.701,- atau 97.13%. Berarti Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.13
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 2

| No | Uraian Program | Anggaran Tahun 2024 (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3.078.491.100 | 2.990.203.701 | 97.13 |
| Jumlah | | 3.078.491.100 | 2.990.203.701 | 97.13 |

Sumber : Laporan e-monev Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2024

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Ada beberapa faktor pendorong dalam mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah :

1. Dukungan anggaran, sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
2. Ketepatan perencanaan dan penetapan target serta sasaran Pembangunan daerah secara keseluruhan;
3. Dukungan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;

3.2 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2024 sebesar Rp. 4.154.740.303,- dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 4.366.777.000,- dengan persentase 95.14% Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4.86% dari pagu yang ditentukan.

Pencapaian sasaran strategis di atas sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya program, kegiatan dan sub kegiatan dalam DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang. Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 beserta anggaran dan realisasinya sebagai berikut:



Tabel 3.14
 Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
 Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kabupaten Sidenreng Rappang
 Tahun Anggaran 2024

| No | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Pagu Anggara (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Capaian (%) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|
| I | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 399.941.000 | 395.366.840 | 98.86 |
| I.1 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 399.941.000 | 395.366.840 | 98.86 |
| 1 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | 399.941.000 | 399.941.000 | 98.86 |
| II | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | 141.780.000 | 140.989.500 | 99.44 |
| II.1 | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 141.780.000 | 140.989.500 | 99.44 |
| 1 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota | 141.780.000 | 140989.500 | 99.44 |
| III | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 68.279.000 | 67.551.000 | 98.93 |
| III.1 | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, & Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 68.279.000 | | 98.93 |
| 1 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota | 68.279.000 | 67.551.000 | 98.93 |
| IV | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | 3.078.491.100 | 2.990.203.701 | 97.13 |



| | | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| IV.1 | Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 25.218.300 | 17.000.000 | 67.41 |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9.218.300 | 3.500.000 | 37.97 |
| 2 | Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5.000.000 | 2.500.000 | 50.00 |
| 3 | Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.500.000 | 2.500.000 | 100 |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.500.000 | 2.500.000 | 100 |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 2.500.000 | 2.500.000 | 100 |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.500.000 | 3.500.000 | |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.470.964.100 | 2.406.714.367 | 97.40 |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.457.522.000 | 2.394.716.767 | 97.44 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | 13.442.100 | 11.997.600 | 89.25 |
| 3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 297.651.500 | 296.799.744 | 99.71 |
| 1 | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor | 109.396.000 | 109.396.000 | 100 |
| 2 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 188.255.500 | 187.403.744 | 99.55 |
| 4 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 180.630.200 | 170.793.500 | 94.55 |
| 1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 31.000.000 | 31.000.000 | 100 |
| 2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 149.630.200 | 139.793.500 | 93.43 |
| 5 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 104.027.000 | 98.896.000 | 95.07 |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 102.977.000 | 97.846.090 | 95.02 |
| 2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1.050.000 | 1.050.000 | 100 |
| V | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | 15.000.000 | 14.223.216 | 94.82 |



| | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| V.1 | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa | 15.000.000 | 14.223.216 | 94.82 |
| 1 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | 15.000.000 | 14.233.216 | 94.82 |
| VI | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | 83.192.400 | 64.503.700 | 77.54 |
| VI.1 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 83.192.400 | 64.503.700 | 77.54 |
| 1 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 37.069.600 | 29.050.700 | 78.37 |
| 2 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | 30.108.000 | 19.650.500 | 65.46 |
| 3 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 |
| 4 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | 11.104.000 | 10.802.500 | 97.28 |
| 5 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan batas Desa | 0 | 0 | 0 |
| VII | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 580.093.500 | 481.902.346 | 83.07 |
| VII.1 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | 580.093.500 | 481.902.346 | 83.07 |
| 1 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna),Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan | 54.855.500 | 47.112.500 | 85.88 |



| | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | |
| 3 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Ada | 20.000.000 | 4.496.800 | 22.48 |
| 4 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 25.238.000 | 11.537.600 | 45.72 |
| 5 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | 5.000.000 | 4.910.000 | 98.20 |
| 6 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 475.000.000 | 413.845.446 | 87.13 |
| | TOTAL | 4.366.777.000 | 4.154.740.303 | 95.14 |



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan bentuk laporan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai.

Memperhatikan data pencapaian kinerja instansi pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugasnya berhasil dengan target capaian kinerja **Sangat Tinggi**, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian (%) | Kriteria |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | Meningatnya Kapasitas Masyarakat Desa | Indeks Ketahanan Sosial (IKS) | 100.01 | Sangat Tinggi |
| | | Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) | 103.07 | Sangat Tinggi |
| | | Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) | 101.82 | Sangat Tinggi |
| 2 | Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak | Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan | 100 | Sangat Tinggi |
| | | Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan | 100 | Sangat Tinggi |



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

4.2 Langkah-langkah Peningkatan Kinerja

Meskipun capaian kinerja tahun 2024 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dikategorikan sangat tinggi, namun masih terdapat kendala dan permasalahan yang memerlukan Upaya dan komitmen Bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Sehubungan dengan kondisi tersebut diatas, Langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan Upaya nyata untuk meningkatkan pemahaman tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan praktis dalam Menyusun dokumen-dokumen kinerja seperti seperti memberikan pelatihan dan bimbingan SAKIP secara komprehensif;
2. Melakukan review terhadap dokumen perencanaan, baik dari substansi sasaran dan indikator sasaran;
3. Perlu dilakukan Upaya untuk membangun komitmen seluruh jajaran mulai dari pejabat atas sampai dengan staf akan pentingnya penerapan SAKIP yang tertib dan berkualitas agar pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dapat dilakukan dengan efektif.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang ke depan. Bagi instansi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan Solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya



konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 disusun dan disajikan. Semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja serta menjadi acuan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Pangkajene Sidenreng, 31 Januari 2025

Kepala Dinas,



H. ABBAS ARAS, SP.,M .AP

Pangkajene : Pembina Utama Muda

NIP :19651231 198711 1 013

